

BAB II

KAJIAN TEORITIK dan TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang membahas mengenai kajian teoritik dan tinjauan pustaka. Fungsi kajian teoritik dan tinjauan pustaka menurut buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia* adalah sebagai landasan teoritik dalam analisis temuan. Bahasan mengenai kajian pustaka memuat komponen sebagai berikut :

1. Teori-teori utama dan teori-teori turunannya dalam bidang yang dikaji.
2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, antara lain mengenai prosedur, subyek, dan temuan.
3. Posisi teoritik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang diturunkan dalam sub-judul kerangka pemikiran dan hipotesis.

Dari pemaparan diatas, hubungannya dengan penelitian yang dikaji adalah bahwa dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kajian teoritik dan tinjauan kepustakaan sebagai hasil penelusuran terhadap beberapa teori dan konsep yang relevan dengan kajian yang dibahas, yaitu mengenai *Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia (Kajian Sejarah Politik dan Intelektual)*. Selain itu, tinjauan pustaka ini berisi tentang pendapat dari berbagai sumber yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang penulis kaji,

sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2.1 TEORI DEPRIVASI RELATIF

Dalam Sarwono (2005:210); Ted Robert Gurr adalah seorang ilmuwan sosial yang memusatkan perhatiannya pada kekerasan politis dengan menggunakan teori deprivasi relatif. teori Gurr mengenai Deprivasi Relatif (dalam bukunya : *Why men rebel*, 1970) muncul karena adanya deprivasi relatif yang dialami masyarakat sebagai perasaan kesenjangan antara nilai harapan (value expectation) dengan nilai kapabilitas (value capabilities) yang dimiliki seseorang. Nilai harapan (value expectation) adalah harapan akan kualitas hidup dan kehidupan sebagai hak untuk dinikmati. Sedangkan nilai kapabilitas (value capabilities) sebagai kondisi untuk mendapatkan harapan itu. Bahkan Gurr meyakini bahwa ketidakpuasan deprivatif relatif akan melahirkan terjadinya berbagai aksi kekerasan massal, karena semakin besar intensitas ketidakpuasan maka semakin besar pula dorongan untuk melakukan kekerasan.

Menurut Gurr dalam Sarwono (2005:210) dijelaskan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan masyarakat yang jauh lebih cepat dari pada perkembangan dirinya sendiri. Sehingga terjadilah deprivasi relatif yang menjadi awal terjadinya pergolakan sosial, huru-hara atau bahkan revolusi.

Sedangkan ahli lain berpendapat bahwa deprivasi relatif adalah sebuah ketidaksesuaian negatif antara harapan yang wajar dengan kenyataannya. Michael Adam dalam Anhar Gonggong (1990:42) menerangkan bahwa :

Persepsi atas penyimpangan antara harapan dan kapasitas ini menimbulkan deprivasi perasaan (sense of deprivation) yang secara relatif dan kolektif telah dialami. Para individu dan kelompok membandingkan status dan kemampuan mereka satu sama lain, atau sama pentingnya terhadap orang-orang yang ada. (atau mereka pikir pernah ada) pada zaman sebelumnya. Dalam proses ini untuk perubahan sangat kritis, karena perubahan itu sendiri menciptakan penyimpangan antara pengharapan yang dibenarkan dan kenyataan baik dengan meperburuk kondisi kelompok, atau dengan menghadapkan kelompok itu dengan kelompok yang baru.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa deprivasi relatif adalah sesuatu yang subjektif, penilaian seseorang yang tidak bisa diamati, kekerasan sosial dan utamanya politik, seperti revolusi dan perang gerilya merupakan bentuk dari gabungan tujuan kolektif. Namun sesuatu yang subjektif tersebut bisa berubah menjadi tujuan kolektif.

Gurr menjelaskan bahwa deprivasi relatif menciptakan potensi bagi kekerasan kolektif, hal ini karena deprivasi relatif merupakan suatu frustrasi yang mengarah kepada agresi. Hubungan antara frustrasi dan deprivasi relatif menurut Gurr dapat dilihat dari definisinya mengenai deprivasi relatif itu sendiri yaitu sebagai persepsi seseorang pelaku atas kesenjangan antara nilai harapan dan nilai kemampuannya. Ia menambahkan pula bahwa *“apa yang orang yakini sebagai haknya dan apa yang mereka pikir mereka mampu memperoleh dan mempertahankannya”*. Dalam hal ini sangatlah penting untuk dicatat bahwa deprivasi tidak hanya berdasar atas keinginan dan kebutuhan semata, tapi atas dasar keinginan dan kebutuhan yang dirasakan harus

dipunyai atau didapat. Seseorang yang merasa berhak atas sesuatu namun ia tidak mendapatkannya, maka ia akan merasa telah dideprivasi.

Kepemilikan hak memang suatu konsep yang normatif. Ini berkaitan dengan kriteria keadilan atas apa yang belum diperoleh, jadi pandangan Gurr tentang deprivasi relatif menghubungkan pula antara keinginan subjektif dan hak yang diinginkan disatu sisi dengan kemampuan disisi lain. Frustrasi terjadi atas ketidakmampuan pemenuhan atas apa yang diinginkan. Dan frustrasi ini menciptakan potensi kekerasan kolektif (agresi).

Kekerasan kolektif menurut Gurr ini pada akhirnya akan semakin menyempit dan membentuk suatu kekerasan politik yang merupakan politisasi ketidakpuasan yang selanjutnya bertransformasinya potensi politik menjadi manifestasi politik. Dua keseimbangan kekuatan menentukan hal ini, *pertama*, adalah keseimbangan antara pemberontak dengan kekuatan penekan rejim yang berkuasa, *kedua*, keseimbangan antara pemberontak dengan lembaga penunjang rejim yang berkuasa. Kekerasan politik menjadi sangat mungkin pada saat rejim yang berkuasa dan pemberontak mempunyai kekuatan yang sama dan lembaga pendukung yang layak dipertimbangkan.

Akan tetapi, teori Gurr tersebut tidak menjelaskan tahapan-tahapan apa yang terjadi sampai pecahnya suatu agresi atau kekerasan kolektif tersebut. Teori yang menjelaskan tahapan-tahapan itu dikemukakan oleh N.J Smelser dalam bukunya *Theory of collective Behavior 1963* (Sarwono, 2005:211). Dalam bukunya Smelser mengemukakan lima prasyarat (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi

untuk terjadinya suatu perilaku massa. Walaupun tidak selalu harus secara kronologis kelima prasyarat itu terjadi, namun kelima prasyarat ini akan saling mempengaruhi.

Kelima determinan itu berturut-turut adalah sebagai berikut (Sarwono,2005:211):

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan (social condusiveness) yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan, dan adanya sarana untuk saling berkomunikasi antara mereka yang jengkel itu.
2. Kejengkelan atau tekanan sosial (structural strain), yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat (kelompok besar atau massa) merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar.
3. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (generalized hostile belief) terhadap suatu sasaran tertentu, seperti pemerintah, kelompok, ras atau kelompok agama tertentu.
4. Mobilisasi massa untuk beraksi (mobilization for action), yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan determinan akhir dari kumulasi determinan yang memungkinkan pecahnya suatu kerusuhan. Sasaran aksi ini menurut Smeler ada dua tahap. Tahap pertama ditunjukkan kepada objek yang langsung memicu kerusuhan dan tahap kedua sasaran ditunjukkan kepada objek lain yang tidak ada kaitan langsung dengan faktor pemicu.
5. Kontrol sosial (social control), yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Determinan ini merupakan determinan lawan dari determinan-determinan sebelumnya. Semakin kuat determinan lawan maka semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan.

Kelima kutipan tersebut merupakan tahap-tahapan yang mendorong lahirnya gejala sosial, saling mendukung dan terkait satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan ini tidak mutlak harus dilalui satu persatu secara kronologis, namun bisa saja ada tahapan yang tidak dilalui tetapi berakhir dengan sama.

Seberapa jauh teori deprivasi relatif ini relevan untuk dijadikan tinjauan atau pendekatan terhadap permasalahan mengenai pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar, Michael Adams dalam Anhar Gonggong (1990:32) menyatakan bahwa :

Teori deprivasi relatif juga cocok untuk kajian perbandingan protes sosial; teori ini cukup luas dan fleksibel untuk mencakup keaneka ragaman penyebab timbulnya gerakan yang berbeda. Konteks historis atau situasi sosial-budaya yang menghasilkan perasaan deprivasi relatif sangat bervariasi. Tuntutan ekonomi mungkin merupakan pusat dalam satu kasus, tetapi masih kurang penting dibandingkan dengan ancaman terhadap kepercayaan keagamaan atau status sosial pada kasus yang lain.

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti menggunakan pendekatan teori deprivasi relatif ini sebagai pisau analisis peneliti dalam memahami pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Walaupun perlu diketahui pula, bahwa tidak menutup kemungkinan adanya teori-teori lain yang digunakan, selama masih relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2.2 PERANAN PEMIKIRAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Skripsi yang berjudul *Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia* ini termasuk dalam tema kajian sejarah intelektual. Menurut Brinton dalam Suwirta (2001:4) mengemukakan bahwa sejarah intelektual adalah '...data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia'. Sementara Stromberg, sebagaimana dikutip Kuntowijoyo (2003:189) mengungkapkan bahwa sejarah intelektual adalah ' *the study of the rule of the ideas in historical event and process*'. Penelitian ini berupaya untuk menganalisa dan

merekonstruksi pemikiran-pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia sebagai suatu karya pemikiran pada masa hidupnya.

Pentingnya mengkaji mengenai Sejarah Intelektual pada dasarnya adalah terletak pada anggapan bahwa perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh ide-ide dan pemikiran. Sesuai dengan yang di jelaskan oleh Harry Tjan Silalahi salah seorang anggota CSIS (center for Strategic International Studies) dalam Suwirta (2001:2), sebagai berikut :

Salah satu kekuatan yang membentuk sejarah adalah pikiran manusia. Ada terdapat hubungan timbal balik dan saling mengait antara pertumbuhan pikiran dan perkembangan sejarah manusia. Di satu pihak setiap pemikiran terjadi dan berkembang didalam sejarah. Dipihak lain sejarah dibentuk dan dikembangkan oleh pemikiran. Sejarah dibentuk oleh pikiran dan pikiran tumbuh menyejarah (Suwirta, 2001:2-3)

Dari penjelasan diatas, betapa pentingnya kekuatan pemikiran terutama berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sejarah tidak terlepas dari manusia dan pikiran manusia itu sendiri sehingga suatu pemikiran manusia dapat merubah dan memberikan perubahan sosial terhadap perkembangan manusia.

Dengan demikian sejarah intelektual sesungguhnya memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pemikiran dan pengaruhnya pada sejarah kehidupan manusia. Karena sejarah intelektual tidak hanya sekedar sejarah filsafat yang hanya melihat ide-ide dan pemikiran itu menyebar, melainkan bagaimana ide-ide dan pemikiran itu dipahami dan di interpretasikan oleh masyarakat.

Menurut Ali Shariati bahwa peranan para cendekiawan atau kaum intelektual adalah membantu masyarakat agar berkembang lebih cepat dengan cara mengenalnya, mempengaruhinya dan memanfaatkannya serta mengaktifkan organ-organ dan hubungan sosialnya, sehingga masyarakat tidak tertinggal dibelakang di dunia modern.

Antonio Gramsci menyatakan “*orang dapat mengatakan semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai fungsi intelektual*”. Menurut Gramsci, mereka yang menjalankan fungsi intelektual dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, *pertama* intelektual tradisional semacam guru, ulama, dan para administrator yang secara terus menerus melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi; dan *kedua* intelektual organik, yang menurut Gramsci dapat dikatakan sebagai kalangan yang berhubungan langsung dengan kelas atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan mereka untuk berbagai kepentingan, serta untuk memperbesar kekuasaan dan kontrol.

Intelektual organik adalah seseorang yang berada dalam masyarakat demokratis, yang mencoba mendapatkan pengakuan dari pelanggan potensial, mendapatkan dukungan, menggaet konsumen atau suara pemilih. Hal ini dapat diartikan bahwa intelektual organik aktif dalam masyarakat, yakni mereka senantiasa berupaya mengubah pikiran dan memperluas pasar. Berbeda dengan para guru dan ulama yang melakoni pekerjaan serupa dari tahun ke tahun, intelektual organik selalu aktif bergerak dan berbuat. Pendapat lain tentang manusia intelektual dikemukakan oleh Julien Benda, yang mendefinisikan intelektual adalah segelintir manusia yang

sangat berbakat dan yang diberkahi moral filsuf raja. Mereka ini yang membangun kesadaran umat manusia. Menurutnya, manusia intelektual adalah makhluk yang langka, karena apa yang mereka junjung adalah standar kebenaran dan keadilan abadi. Sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah ditemukan di dunia yang fana ini, sehingga dapat dikatakan intelektual sejati menciptakan tatanan dalam masyarakat, yang kegiatannya pada dasarnya bukan untuk mencapai tujuan praktis, namun mereka yang menemukan kepuasan dalam mempraktekkan seni atau ilmu pengetahuan, atau spekulasi metafisik. Benda menambahkan, intelektual sejati tetap dengan jati dirinya, digerakkan oleh dorongan metafisis dan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Mereka memerangi korupsi, melindungi si lemah, serta menentang otoritas yang menyimpang dan zalim

(www.jakartabeat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56.) di akses di Bandung. [21 Februari 2011].

Dari penjelasan diatas terlihat bagaimana peranan pemikiran dan kaum intelektual yang sangat berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Peranan para cendekiawan dalam membangun masyarakat terletak pada usahanya dalam kehidupannya yang selalu dinamik, artinya bahwa para cendekiawan akan selalu memiliki pemikiran kedepan utuk dapat membuat hidupnya lebih maju dibanding masyarakat sekitarnya. Dengan demikian masyarakat disekitarnya tersebut akan mengalami perubahan pula akibat pemikiran tersebut.

Suatu pemikiran dapat mengubah cara pikir masyarakat sehingga peran para intelektual atau cendekiawan dengan pemikirannya dapat memberikan perubahan

sosial pada masyarakat baik itu secara lambat ataupun cepat. Pemikiran-pemikiran yang baru dari seorang intelektual akan memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan suatu daerah dan masyarakat. Masyarakat akan diajarkan dengan pemahaman-pemahaman yang baru yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi.

Selain bagi masyarakat, peran kaum intelektual dengan pemikiran-pemikirannya, akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, dalam hal ini kaum intelektual dapat memberikan masukan-masukan dan pendapat bagi pemerintah agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga dengan demikian, pemerintah dapat mengontrol setiap kebijakan-kebijakannya untuk pembangunan daerah dan masyarakat.

2.3 KAHAR MUZAKKAR DAN DARUL ISLAM

Ketika kita membahas mengenai pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar di Indonesia. Kita tidak akan pernah lepas dari keterkaitan antara dirinya dengan Darul Islam (DI). Tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun 1950an, telah terjalin suatu hubungan yang baik antara Kahar Muzakkar dan Darul Islam di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.

Ketika pemerintah menganjurkan penyelesaian masalah Kahar Muzakkar beserta para gerilyawan pengikutnya untuk kembali kepangkuan Republik Indonesia. Kahar Muzakkar malah memperkuat posisinya dengan melakukan hubungan antara dirinya dan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan pertama yang mereka lakukan

adalah pada Agustus tahun 1951 ketika Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan surat kepada Kahar Muzakkar dan menawarkan kepada dirinya pimpinan Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya.

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa hubungan antara Kahar Muzakkar dengan Darul Islam di Jawa Barat atau pun hubungan Kahar Muzakkar dengan golongan yang lainnya, itu merupakan tanggapan dari Kahar Muzakkar dan pasukannya atas keresahan yang mereka rasakan setelah mereka memasuki hutan akibat kekecewaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keresahan tersebut dijelaskan oleh Barbara Sillar Harvey (1989:194) bahwa semenjak Kahar Muzakkar dan para pengikutnya masuk hutan dan menyatakan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia, mereka disana menghadapi masalah besar yaitu mengenai pembenaran atas tindakan perlawanan dan dasar dari perlawanan yang mereka lakukan tersebut. Barbara Sillar Harvey menjelaskan pula bahwa untuk membenarkan suatu pemberontakan diperlukan suatu motif baru atau suatu ideologi bagi pemberontak yang menjadi dasar atas pemberontakan yang dilakukannya.

Sehingga atas dasar keresahan tersebut, Kahar Muzakkar dan pasukannya berusaha untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan golongan lain sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi mereka dan cara dalam pencarian ideologi atau dasar pemberontakan yang cocok dengan tujuan gerakan yang mereka kehendaki.

Selain penjelasan diatas yang memaparkan mengenai usaha Darul Islam di Jawa Barat yang mencoba melakukan suatu hubungan politik dengan Kahar Muzakkar dan pasukannya di Sulawesi Selatan. Ada keterangan lain yang menjelaskan bahwa selain Darul Islam, Partai Komunis Indonesia pun berusaha untuk mendekati dan mempengaruhi Kahar Muzakkar beserta pasukannya agar mau bergabung dan memakai ideologi komunis sebagai dasar gerakannya.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Barbara Sillar Harvey dalam bukunya *Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DI/TII* (1989:197) :

Dalam cerita Kahar sendiri mengenai awal pemberontakan, ia berkata bahwa Komite Sentral PKI mengirim dua orang yang telah dikenalnya di Jawa untuk menghubungi dirinya pada akhir tahun 1950. Letnan Kolonel Pramudji (atau Pamudji) yang menjadi rekannya di Dewan kelasjkan, dan Mohammad junus, seorang teman sekelasnya di sekolah Mualimin Muhammadiyah di Solo. (Ia berkata bahwa Mohammad Junus ditunjuk sebagai wakil PKI di Sulawesi dan Maluku, sebagai wakil Karel Supit, dan telah membuka kantor di rumah Paiso, seorang anggota PKI di Makasar). Dalam cerita ini dua delegasi tersebut bertemu dengan Kahar dan sejumlah Komandannya (ia menyebut Saleh Sahban, Kaso gani, Andi Tanriadjeng, Andi Selle dan Andi Sose) dan setuju untuk membentuk sebuah badan kerja sama untuk mendukung persatuan nasional dan memotong hubungan kolonial yang terjalin oleh tipu muslihat dari persetujuan Linggarjati, renville dan Konferensi meja Bundar yang masih mengikat Indonesia. (Barbara Sillars harvey, 1989:197).

Pernyataan Barbara Silallar Harvey tersebut didukung oleh Syafarudin Usman (2010:32). Syafarudin Usman membenarkan bahwa setelah Kahar Muzakkar melakukan pelarian ke hutan bulan Juli 1950, ia segera dihubungi oleh sejumlah wakil dari beberapa organisasi yang beraliran Komunis dan yang berfaham Islam militan untuk melakukan barbagai kerjasama. Dan orang yang memainkan peran

penting dalam upaya mengatur perundingan dengan Kahar Muzakkar tahun 1950 dan 1951 adalah politisi Bugis yaitu Salawati Daud. Yang menurut pendapat lain bahwa Salawati Daudlah yang mempengaruhi Kahar Muzakkar dengan faham komunis. Tetapi ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa Salawati Daud pulalah yang melaporkan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai kehidupan Kahar Muzakkar beserta anak buahnya didalam hutan selama tahun 1950-1951.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Darul Islam di Jawa Barat saja yang melakukan pendekatan terhadap Kahar Muzakkar dan pasukannya di Sulawesi Selatan, melainkan Partai Komunis Indonesia pun tidak mau ketinggalan untuk dapat merebut hati Kahar Muzakkar dan menyarankan agar ide-ide komunislah yang menjadi dasar dari gerakan Kahar Muzakkar beserta pasukannya.

Penjelasan mengenai usaha Darul Islam di Jawa Barat untuk mendapatkan simpatik dari Kahar Muzakkar dan pasukannya, Al Chaidar menjelaskan bahwa ketika pemerintah Republik Indonesia melakukan penyelesaian konflik Kahar Muzakkar dengan *politik Psikologisnya*, Kahar Muzakkar malah memperkuat posisinya dengan melakukan pembaharuan hubungan dengan S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungan tersebut dilakukan ketika Kahar Muzakkar telah masuk hutan bulan Agustus tahun 1951. Pada waktu itu Kahar Muzakkar didesak oleh Bukhri yang merupakan wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Abdullah Riau Soshby, seorang pemimpin dan komandan Mujahid Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat yang bertugas untuk membentuk "*Komandemen TII*" untuk Sulawesi. Dan Kartosoewirjo pun secara pribadi mengirimkan surat kepada Kahar

Muzakkar dan menawarkan kepadanya pimpinan dan komandan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi.

Dengan demikian, selain Kartosoewirjo mengirimkan surat secara pribadi kepada Kahar Muzakkar, ia pun mengutus seorang utusan untuk dapat memdesak Kahar Muzakkar agar mau bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat dan memangku jabatan sebagai Komandan Darul Islam Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Selain penjelasan menurut Al Chaidar tersebut, Bahar Matallioe yang merupakan anak buah kepercayaan Kahar Muzakkar pada saat gerakan tersebut berlangsung menjelaskan (1994:183) bahwa ketika terjadinya perlawanan di Sulawesi Selatan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, S.M. Kartosoewirjo telah mempersiapkan seorang utusan yang bernama Arnaz yang direncanakan akan menjadi calon panglima DI/TII di Sulawesi Selatan. Utusan Arnaz datang menemui dirinya dengan membawa dokumen yang berisi penjelasan-penjelasan tentang perjuangan Islam yang dikutip dari *Pedoman Dharma Bhkati* yang telah disusun oleh Imam Kartosoewirjo. Dalam surat Arnaz tersebut, ia menyampaikan pujian dan penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya dan mengharapkan ia membentuk satu negara Islam di Sulawesi Selatan.

Namun, berkas dokumen yang dikirimkan oleh Arnaz tersebut segera ia kirim kepada Kahar Muzakkar dan memaksanya untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam di Sulawesi Selatan sebelum posisi tersebut diisi oleh Arnaz sebagai calon panglima yang diusulkan oleh Kartosoewirjo. Bahar Mattalioe pun menekankan

pada Kahar Muzakkar bahwa tidak ada untungnya perjuangan yang dilakukannya selama ini jika tanpa suatu dasar perjuangan yang jelas, dan sebaiknya sebagai seorang pemimpin Kahar Muzakkar tak perlu ragu karena ia akan sepenuhnya mendukung jika akhirnya Islam lah yang dipilih sebagai ideologi.

Sehingga dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Darul Islam yang di pimpin oleh Imam Kartosoewirjo memang melakukan usaha-usaha untuk menarik simpatik Kahar Muzakkar dan pasukannya agar mau bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat dan membentuk sebuah Negara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Namun, menyikapi hal tersebut Kahar Muzakkar dan pasukannya masih terus mempertimbangkan tawaran tersebut dan belum secara resmi menerima atau menolak usulan dari Kartosoewirjo tersebut.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PKI dalam merebut simpati Kahar Muzakkar dan pasukannya agar mau bergabung dengan Komunis adalah dengan mengirim dua orang yang telah dikenal oleh Kahar Muzakkar di Jawa untuk menghubungi dirinya pada akhir tahun 1950. Letnan Kolonel Pramudji (atau Pamudji) yang menjadi rekannya di Dewan kelasjkan, dan Mohammad junus, seorang teman sekelasnya di sekolah Mualimin Muhammadiyah di Solo. (Kahar Muzakkar berkata bahwa Mohammad Junus ditunjuk sebagai wakil PKI di Sulawesi dan Maluku, sebagai wakil Karel Supit, dan telah membuka kantor di rumah Paiso, seorang anggota PKI di Makasar). Dalam cerita ini dua delegasi tersebut bertemu dengan Kahar dan sejumlah Komandannya (ia menyebut Saleh Sahban, Kaso gani, Andi Tanriadjeng, Andi Selle dan Andi Sose) dan setuju untuk membentuk sebuah

badan kerja sama untuk mendukung persatuan nasional dan memotong hubungan kolonial yang terjalin oleh tipu muslihat dari persetujuan Linggarjati, renville dan Konferensi Meja Bundar yang masih mengikat Indonesia.

Sebagai langkah awal dalam kerjasama ini, Kahar Muzakkar meminta kepada pramudji untuk mengirimkan bantuan militer kepada seorang perwira Jepang, yang menggunakan nama samaran Umar. Ia merupakan satu diantara banyak perwira yang masuk dalam *Barisan Sakit hati di Jawa*. Dan Komite Sentral PKI pun mengirim Mayor Kadarisman yang merupakan salah satu orang yang terlibat dalam *peristiwa Madiun* dan delegasi lain yang bernama Jusuf Karnain yang bertugas untuk mengajar anak-anak sekolah Dasar di daerah Enrekang dengan faham-faham Komunis seperti menyanyikan lagu *Internasionale*.

Namun pada akhir tahun 1952 hubungan antara Komite Sentral PKI dan Kahar Muzakkar sepertinya tidak berjalan baik, Barbara Sillar Harvey (1989:197) menjelaskan bahwa delegasi PKI yang ditugaskan mengajar anak-anak di Sekolah Dasar Enrekang diperintahkan untuk dibunuh setelah Kahar Muzakkar memutuskan bahwa pemberontakannya tidak akan berdasarkan Komunisme. Sehingga pada tahun 1952 tersebut Kahar Muzakkar dan pasukannya telah menolak untuk bergabung dengan PKI dan tidak akan menggunakan ide-ide komunis sebagai dasar dari gerakannya.

Keputusan Kahar Muzakkar terhadap Ideologi yang akan dipilihnya sangat ia pertimbangkan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kahar Muzakkar tidak bertindak egois yang hanya mengandalkan pemikirannya saja tetapi ia pun

menyelidiki dan bertanya kepada para pengikutnya yang dianggap masih setia mengenai dasar gerakannya tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan Barbara Sillar Harvey (1989:198):

... Kahar menghadapi kebutuhan mendesak untuk memastikan kesetiaan pasukan-pasukannya yang masih tinggal dan dukungan rakyat yang diandalkan dalam suatu situasi peperangan gerilya. Ia diberitakan telah menyelidiki para komandan bawahannya, dan telah menanyai mereka apakah perjuangan mereka harus didasarkan pada Komunis atau Islam. Hanya Usman Balo dan Hamid Ali yang bersikap dingin terhadap gagasan suatu negara Islam. Bahar Mattalioe terutama berkeras bahwa hanya dengan mendasarkan perjuangannya pada Islam mereka akan dapat memperoleh dukungan dari rakyat Sulawesi Selatan.

Selain pernyataan tersebut, Barbara Sillars Harvey menjelaskan analisisnya bahwa Kahar Muzakkar telah memperhitungkan jika ia memilih Komunis sebagai dasar perjuangannya maka dukungan para anggota progresif bangsawan yang menyetujui cita-cita keadilan sosial akan hilang, sehingga ia mencoba mempertahankan dukungan mereka tanpa menghilangkan ide keadilan sosial tersebut dengan mendasarkan perjuangannya pada ideologi Islam untuk menegakan suatu Negara Islam Indonesia. Perkiraan bahwa Islam dengan prinsip persamaan haknya dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

Sehingga atas pertimbangan yang matang dan dengan didorong oleh pendapat pasukan-pasukannya tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 1952 Kahar Muzakkar memutuskan bahwa dasar dari perlawanan yang dilakukannya beserta pasukan-pasukannya di Sulawesi Selatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia akan didasarkan pada ideologi Islam dan dengan ini ia beserta pasukannya menyatakan bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat pimpinan Kartosoewirjo dan ia

menerima jabatan sebagai Komandan Tentara Islam Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Namun, walaupun Kahar Muzakkar telah bergabung dan menjabat sebagai panglima daerah Tentara Islam Indonesia, tetapi ia untuk sementara tidak mau menggunakan nama itu untuk pasukan-pasukannya. Terlihat bahwa pada bulan Maret 1952 Kahar Muzakkar menamakan pasukan-pasukannya sebagai Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) dengan konsep Trisilanya yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Keadilan sosial, dan (3) Kemanusiaan. Dan baru pada tanggal 7 Agustus 1953, tepat 3 tahun setelah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar menyatakan bahwa Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dan menamakan pasukannya sebagai Tentara Islam Indonesia.

Keputusan Kahar Muzakkar yang pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan Darul Islam (DI) dan perjuangan yang dilakukannya akan berdasar pada ideologi Islam merupakan sebuah keputusan yang patut dipertanyakan. Mengapa Kahar Muzakkar lebih memilih Islam sebagai Ideologi gerakannya dan tidak memilih komunis. Dalam bukunya Syafarudin Usman menjelaskan bahwa dalam diri Kahar Muzkkar terdapat campuran tiga ideologi, yaitu : Ideologi Nasionalisme, Ideologi Islam dan Ideologi Marxisme. Dan ketiga ideologi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dari seorang Kahar Muzkkar. Karena dari perpaduan ketiga ideologi tersebut telah membentuk watak khas didalam kehidupan Kahar Muzakkar.

Kahar Muzakkar memperoleh pendidikan dan bersekolah di Sekolah Muhammadiyah, ia pun pernah dibuang dari Luwu karena protesnya terhadap sistem feodal di Sulawesi, selama revolusi ia bekerja di *Biro Perjuangan* dibawah pengaruh Amir Syarifudin dan Djokosujono dan sejumlah orang yang bersekutu erat dengan golongan kiri. Didalam gaya hidupnya, Kahar Muzakkar menunjukkan unsur-unsur yang dianggapnya sebagai ideologi dan praktik dari Marxisme. Ia mendasarkan falsafah kenegaraannya tidak hanya atas agama Islam, tetapi atas keadilan sosial dan demokrasi sejati. Sehingga keputusan untuk memilih Islam merupakan sebuah keputusan yang berani yang dipilih oleh seorang Kahar Muzakkar yang dilatar belakangi oleh ketiga paham tersebut.

Dalam kaitannya dengan keputusan Kahar Muzakkar yang lebih memilih ideologi Islam dibanding ideologi Komunis dan Nasionalis, Anhar Gonggong memiliki analisis mengenai hal tersebut. Menurutnya telah terjadinya suatu pertemuan kesamaan antara suasana lingkungan masyarakat yang berkeyakinan kuat terhadap Islam dengan kebudayaan setempat dan lingkup pendidikan yang pernah diperoleh Kahar Muzakkar (Anhar Gonggong, 1990:242).

Lebih lanjut Anhar Gonggong menjelaskan bahwa keputusan terhadap pemilihan Ideologi Islam tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Kahar Muzakkar yang seorang bekas anak Pesantren di Jawa yang cukup taat dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Latar belakang pendidikan Islam yang dimilikinya tersebut berasimiliasi dengan suasana lingkungan di Sulawesi Selatan yang mayoritas merupakan masyarakat Islam yang berkeyakinan kuat terhadap

kebudayaannya. Sehingga hal tersebut menjadi alasan Kahar Muzakkar harus memilih Islam sebagai Ideologi perjuangannya, tetapi hal ini terlepas dari kepentingannya terhadap dukungan dari para pendukungnya.

Selain analisis tersebut, Kholid O. Santosa (2009:145), Ia Menjelaskan bahwa Kahar Muzkkar berencana ingin melakukan sebuah revolusi namun rencana itu gagal karena bawahannya tidak teguh pada pendiriannya. Dalam hal ini Kartosoewirjo mencoba mendesak Kahar Muzakkar agar melakukan upaya untuk menjadikan pasukannya bersemangat Islam dan bernegara Islam, serta melanjutkan hal-hal yang diperlukan dan dianjurkan oleh Syariat Islam selama perang. Sehingga rencana melakukan revolusi yang diinginkan Kahar akan tercapai. Dan Kahar Muzakkar beranggapan bahwa hanya dengan Islamlah sebuah revolusi akan berjalan sesuai tujuannya.

Semangat untuk melakukan revolusi tersebut semakin berkobar setelah Kahar Muzkkar mengalihkan pandangannya dengan menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya. Yang memang hal tersebut disesuaikan dengan emosi masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai penganut Islam fanatik.

Pada tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kahar Muzakkar bergabung dengan Darul Islam dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam di bagian Timur dengan bendera negara yang berwarna dasar merah putih dengan lambang bulan bintang ditengahnya. Dan mulai saat itu Kahar Muzakkar resmi bergabung dengan Darul Islam pimpinan S.M Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Demikianlah Kahar Muzakkar menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dengan nama Divisi Hasanuddin. Kahar Muzakkar sangat berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan Kartosoewirjo atas pengangkatan dirinya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi. Namun, Kahar Muzakkar menjelaskan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam Indonesia (C. V. Dijk, 1983: 175).

Atas dasar pernyataan Kahar Muzakkar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Barat tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. C.V Dijk menambahkan pula bahwa Kahar Muzakkar pun sepertinya tidak menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indonesia yang digagas oleh Kartosoewirjo.

2.4 KAHAR MUZAKKAR, NEGARA DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Gerakan dan perjuangan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada tahun 1950an pasti tidak terlepas dari pemikiran dan cita-cita yang hendak ia capai. Berbagai sumber menjelaskan bahwa Kahar Muzakkar memiliki pemikiran politik mengenai konsep Negara dan pemerintahan Indonesia. Sehingga dari pemikirannya

tersebut membuat ia melakukan sebuah perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

Pemikiran dan cita-cita Kahar Muzakkar tersebut menjadi salah satu latar belakang ia melakukan sebuah perlawanan yang dianggap sebagai pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun perlu diketahui pula bahwa perjalanan pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muazakkar tidak terlepas dari pemikiran serta ideologi yang mendasari gerakannya tersebut. Mengenai ideologi yang dipilih oleh Kahar Muzakkar dalam melakukan gerakan pemberontakan tersebut, Kahar Muzakkar ternyata lebih memilih Ideologi Islam dibanding ideologi yang lainnya, sehingga didalam dirinya terjadi sebuah perubahan besar dalam haluan berpikir yang semakin idealis dengan konsep Islamnya.

Anhar Gonggong menjelaskan bahwa ketika Kahar Muzakkar secara resmi menyatakan bergabung dengan Darul Islam yang dipimpin oleh S.M Kartosoewirjo yaitu pada tanggal 7 Agustus 1953, itu berarti telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dari gerakan yang dipimpinnya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut kedalam dua hal yaitu : (1) Ideologi gerakan dan (2) Tujuan gerakan.

Ketika gerakan Kahar Muzakkar masih bernama Crop Tjadangan Nasional (CTN) dan kemudian berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka ideologi gerakannya masih berdasarkan pada Pancasila dan tujuan gerakannya untuk menjadi anggota APRI (S). Sedangkan setelah Kahar Muzakkar menyatakan dirinya merupakan bagian dari Darul Islam di Jawa Barat, maka tentu saja ideologi dan

tujuan gerakannya pun ikut berubah. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketika pernyataan kesediannya untuk bergabung dengan Darul Islam dan menerima pengangkatannya sebagai Panglima Divisi Hasanuddin, ia menyatakan pula bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesia yang dikehendaki oleh Kartosoewirjo.

Anhar Gonggong menjelaskan pula bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar memiliki dua tahap yang berbeda yaitu : *Tahap pertama* tahun 1951-1953 (sampai pada proklamasi penggabungan dengan Darul Islam tanggal 7 Agustus 1953) sebagai tahap penggalangan dan masa peralihan dan *Tahap kedua* tahun 1953-1965 adalah tahap yang disebut sebagai *revolusi Islam*. Dari kedua tahap ini jelas terlihat perubahan dalam setiap aspek perjuangan Kahar Muzakkar dari ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Namun, dari kedua ideologi tersebut ternyata Kahar Muzakkar memiliki pandangan dan tafsiran lain terhadap kedua ideologi tersebut.

Pandangan Kahar Muzakkar terhadap kedua ideologi tersebut tercermin dalam suatu konsep yang ia ciptakannya sendiri yang disebut *Revolusi Kemerdekaan Sejati* yang diterima dan ditanda tangani oleh para Komandan bawahannya. Menurutnya konsep *Revolusi kemerdekaan Sejati* merupakan analisis situasi negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ia menganggap bahwa telah terjadi pembelotan dan pemalsuan dari perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pemimpin rakyat yang tidak mempunyai tanggung

jawab terhadap bangsa dan negara. Dan sebaliknya menjadi lawan dari cita-cita kemerdekaan sejati.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kahar Muzakkar memiliki sebuah pemikiran tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia yang ingin ia gagas bersama pasukannya. Pemikiran tersebut menjadi salah satu latar belakang ia melakukan sebuah perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggapnya sudah tidak sejalan lagi dengan keinginan rakyat Indonesia khususnya rakyat Sulawesi Selatan.

Pemikiran tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia yang digagas oleh Kahar Muzakkar ini dapat kita temukan dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi negara Demokrasi Indonesia*. Dalam buku ini Kahar Muzakkar terlebih dahulu menjelaskan tentang kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu yang dianggapnya telah gagal dalam melaksanakan konsep demokrasi Indonesiannya. Kegagalan pemerintahan tersebut menurut Kahar Muzakkar adalah karena Soekarno terlalu ambisius dalam mencapai cita-cita demokrasi tanpa berpikir akan keinginan rakyat diseluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam bukunya ini Kahar Muzakkar menjelaskan pula mengenai berbagai pandangannya, seperti pandangannya terhadap Pancasila, Soekarno dan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia dalam pikirannya. Menurutnya, kebangkitan segenap rakyat Indonesia mengikuti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah bukti bahwa rakyat Indonesia berjiwa merdeka dan cinta akan demokrasi, menghendaki kehidupan yang bebas dan terlepas dari segala macam penjajahan.

Ia pun menambahkan bahwa cita-cita tersebut telah dikhianati oleh para pemimpin Indonesia yang tidak bertanggung jawab yang dipelopori oleh Soekarno. Soekarno dianggapnya tidak memiliki konsepsi ketatanegaraan yang tegas, dan inilah yang menyebabkan timbulnya pertikaian paham dan perpecahan yang berakibat pada terjadinya perang Saudara.

Kahar Muzakkar berpendapat bahwa perpecahan dan perang saudara tersebut disebabkan oleh dua pokok masalah yaitu : *Pertama*, tidak adanya dasar negara yang kuat dan tegas. Soekarno telah menjadikan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima pokok dasar yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Indoensia, 3. Perikemanusiaan, 4. Kedaulatan Rakyat dan 5. Keadilan Sosial.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila tersebut, oleh golongan Islam dianggap samar dan meragukan, dan hal ini menjadikan dan menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat. Golongan Islam menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam.

Kedua, bagian lain yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan, kekacauan dan perang saudara diberbagai daerah di Indonesia ialah karena tidak adanya sistem pemerintahan yang tepat. Menurutnya, pemerintahan sistem parlementer dan sistem presedentil yang dilakukan silih berganti pada masa kepemimpinana Soekarno telah menimbulkan kekacauan karena pemerintah tidak belajar dari pengalaman melainkan selalu memaksakan kehendak demi kepentingan segelintir golongan.

Kembali pada permasalahan mengenai pemikiran politik Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia, semua itu tidak terlepas dari pandangan dan tafsiran Kahar Muzakkar terhadap Ideologi Islam dan Pancasila. ketika pada akhirnya Ia memutuskan untuk bergabung dengan Darul Islam dan menyatakan bahwa perjuangannya akan berlandaskan Islam. Maka Pancasila yang dulu menjadi dasar perjuangannya kini dicelanya habis-habisan dan Kahar Muzakkar lebih idealis dengan ideologi Islamnya.

Menurutnya, dasar negara yang harus diterapkan oleh suatu bangsa harus berdasarkan pada ideologi mayoritas rakyatnya. Jika dikaitkan dengan negara Indonesia, maka negara Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam maka harus mutlak dasar negaranya Islam pula sehingga kebutuhan mayoritas rakyatnya akan terpenuhi dan terhindar dari kekacauan.

Namun, konsep dasar negara Islam yang digagas oleh Kahar Muzakkar berbeda dengan konsep dasar negara Islam yang dicita-citakan oleh S.M. Kartosoewirjo, walaupun mereka sama-sama tergabung dalam Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dalam pandangannya Kartosoewirjo menginginkan Indonesia menjadi negara Islam Indonesia yang berbentuk Presidensial. Menurutnya, pemerintahan Indonesia yang berbentuk presidential ini dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Kahar Muzakkar mengharapkan pembentukan negara-negara bagian dengan mengedepankan keadilan sosial. Ia sangat menghormati beragam agama dan kepercayaan di Indonesia. Sehingga, dalam negara-negara bagian

mempunyai bentuk pemerintahan negara bagian sendiri, tapi tentu saja berdasarkan ajaran agama dan peradabannya masing-masing, dan menurut ketentuan yang dinyatakan dalam Undang Undang Dasar negara bagian masing-masing. Dengan demikian, menurut Kahar Muzakkar, masing-masing golongan suku bangsa Indonesia akan hidup dalam lingkungan daerah negara bagiannya dengan bebas merdeka. Sehingga jelaslah bahwa Kahar Muzakkar menginginkan Indonesia berbentuk negara federal Islam yang mengusung sistem pemerintahan demokrasi sejati (Kahar Muzakkar, 2008:80).

Bentuk negara bagian yang dikehendaki oleh Kahar Muzakkar bisa dilakukan dengan menetapkan bentuk negara-negara bagian dalam *principe* menegakan norma-norma hidup bermasyarakat harmonis, demokratis dan damai. Pembentukan negara-negara bagian tersebut menurutnya, bisa berdasarkan pada *administrative indeling*, daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar, seperti Jawa, Madura, Pasundan, Aceh dll, ataupun berdasarkan daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil diluar pulau Jawa, ditambahkan dengan penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa. Dalam negara-negara bagian itu masing-masing golongan suku bangsa mempunyai bentuk pemerintahan sendiri berdasarkan ajaran agama dan peradabannya sendiri-sendiri, tergantung pada ketentuan yang dinyatakan dalam UUD negara tersebut. Tetapi tentu saja, masih dalam ikatan pemerintahan demokratis Indonesia.